



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

**KOMISI VIII DPR RI (BIDANG AGAMA, SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEBENCANAAN)**

| | |
|------------------|---|
| Tahun Sidang | : 2020-2021 |
| Masa Persidangan | : IV |
| Rapat Ke | : 7 |
| Jenis Rapat | : Rapat Kerja |
| Dengan | : 1. Menteri Sosial RI 2. Menteri Keuangan RI 3. Kepala BNPB RI |
| Sifat Rapat | : Terbuka |
| Hari, Tanggal | : Selasa, 16 Maret 2021. |
| Waktu | : Pukul 13.30 WIB. |
| Tempat | : Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI Gedung Nusantara II lantai 1 Jl. Jenderal Gatot Subroto – Jakarta 10270. |
| Acara | : Anggaran Penanggulangan Bencana |
| Ketua Rapat | : H.Yandri Susanto, S.Pt |
| Sekretaris Rapat | : Sigit Bawono Prasetyo, S.Sos., M.Si. |
| Hadir | : 1. 37 dari 49 Anggota Komisi VIII DPR RI. 2. 11 Anggota Komisi VIII DPR RI Izin. 3. Menteri Sosial RI Beserta Jajaran. 4. Kepala BNPB RI beserta Jajaran. 5. Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan RI Beserta Jajaran. |

I. PENDAHULUAN:

1. Ketua Rapat membuka Rapat Komisi VIII DPR RI pada pukul 13.45 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi VIII DPR RI, H.Yandri Susanto, S.Pt dengan didampingi Wakil Ketua Hj.Diah Pitaloka, S.Sos., M.Si., Wakil Ketua DR. H. TB. Ace Hasan Syadzily, M.Si dan Wakil Ketua Laksdya TNI (PURN) Moekhlas Sidik, MPA., sesuai waktu dan tempat acara tersebut di atas.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Pada Rapat Kerja Gabungan antara Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Sosial RI, Kementerian Keuangan RI dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dengan agenda membahas "**Anggaran Penanggulangan Bencana**", disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Komisi VIII DPR RI meminta Menteri Sosial RI, Kepala BNPB dan Kementerian Keuangan RI untuk mengkaji mengenai *mandatory budgeting* sebesar 2 persen dalam APBN dan APBD untuk penanggulangan bencana, sebagaimana rumusan dalam RUU tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
2. Komisi VIII DPR RI akan mengadakan rapat dengan Kepala Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota untuk membahas alokasi anggaran dari APBD untuk penanggulangan bencana.
3. Komisi VIII DPR RI meminta Kementerian Keuangan RI untuk membuat skema anggaran untuk penanggulangan bencana secara menyeluruh dan terpadu.
4. Komisi VIII DPR RI mendorong BNPB untuk menggunakan Dana Siap Pakai (DSP) secara efisien, transparan dan akuntabel serta diperuntukkan bagi penanganan bencana di seluruh Kementerian/Lembaga.
5. Komisi VIII DPR RI meminta Menteri Sosial RI, Kementerian Keuangan RI dan Kepala BNPB Kementerian Keuangan RI untuk menindaklanjuti pandangan dan pendapat dari Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI sebagai berikut:
 - a. Menyiapkan anggaran yang memadai dalam rangka memastikan pemenuhan kebutuhan pokok dan kebutuhan dasar korban bencana.
 - b. Memperkuat kearifan lokal dan peran serta masyarakat dalam penanggulangan bencana.
 - c. Memastikan kebutuhan anggaran dan peralatan penanggulangan bencana sesuai kebutuhan dan mengantisipasi timbulnya kerugian negara.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 17.04 WIB.

**PIMPINAN KOMISI VIII DPR RI
KETUA,**



H.YANDRI SUSANTO, Spt.